LAPORAN PENELITIAN

OLIGOPOLI MEDIA MASSA AUSTRALIA

PENELITI :

ANNA YULIA HARTATI, S.IP, M.A

NIDN: 0627077601

YUSMITA WAHYUNI

NIM: 172020043

UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG

2020

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Oligopoli Media Massa Australia

Bidang Penelitian : Hubungan Internasional

Peneliti 1

a. Nama Lengkap : Anna Yulia Hartati, S.IP,M.A

b. NPP : 04.01.1.0050

c. NIDN : 0627077601

d. Jabatan Fungsional : Lektor

e. Jabatan Struktural : -

f. Fakultas/Jurusan : Isip / Hubungan Internasional

g. Pusat Penelitian : LP2M UNWAHAS

h. Alamat Institusi : Universitas Wahid Hasyim Semarang, Jl. Menoreh Tengah X/22 Sampangan Semarang 50236

Peneliti 2

a. Nama Lengkap : Yusmita Wahyuni (Mahasiswa)

b. NIM : 172020043

c. Fakultas/Jurusan : Isip/Hubungan Internasional

Semarang, 20 Juni 2020

Dekan Fisip

H. Agus Riyanto, S.IP., M.Si.
NPP. 04.01.1.0036

Peneliti,

Anna Yulia Hartati, S.IP, MA
NPP. 04.01.1.0050

Mengetahui
Ketua LP2M Unwahas

Dr. Ifada Retno Ekamingrum, S.Ag, M.Ag
NPP. 08.05.1.0124

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....i

Halaman Pengesahan.....ii

Daftar Isi.....iii

Ringkasan.....iv

Bab I.Pendahuluan.....1

Bab II. Metode Penelitian.....4

Bab III. Hasil dan Pembahasan.....10

Bab IV. Kesimpulan.....12

Daftar Pustaka.....16

Lampiran.....17

RINGKASAN

Penelitian ini membahas tentang praktek oligopoli media massa Australia. Oligopoli media di Australia berkembang selain karena faktor ekonomi, juga karena faktor politik. Telah diketahui bahwa untuk membentuk suatu media massa membutuhkan dana yang tidak sedikit. Setelah suatu media terbentuk, masih dibutuhkan dana yang tidak kalah besar untuk biaya-biaya produksi ketika menjalankannya. Banyak sekali surat kabar di Australia yang bangkrut karena masalah finansial, seperti *Daily Sun and Sunday Sun, Perth's Western Mail, Brisbane's Telegraph, Business Daily dan Sydney Mid-week News*. Oligopoli ini semakin berkembang karena faktor-faktor politik yang ada seperti pemberian izin membuat televisi ke beberapa perusahaan tertentu saja. Lagipula, sebagai pemain lama raja-raja media di Australia sudah mendapatkan kemapanan yang sangat sulit diganggu, baik dalam konteks ekonomi maupun dalam konteks politik.

Dua penguasa media yang paling besar dan terkenal adalah Rupert Murdoch dan Kerry Packer. Tidak hanya raja media di Australia, mereka berdua termasuk penguasa-penguasa media di dunia ini. Murdoch, yang selama puluhan tahun mengembangkan sayap News Corporation miliknya ke berbagai pelosok dunia, adalah pemilik saham di Fox Network, Star TV, Studio 20th Century Fox, surat kabar The Times dan The Sun di London, televisi kabel Fox News, Fox Sport dan lainnya. Di Australia sendiri, Murdoch memiliki 16 televisi lokal. Sementara Kerry Packer memiliki Australian Consolidated Press (ACP) dan Publishing and Broadcasting Limited (PBL). Dalam bidang media, PBL memiliki sembilan jaringan televisi di Australia dan Australian Consolidation Press. PBL memiliki jumlah investasi yang besar dalam berbagai televisi berbayar dan jaringan televisi digital, seperti Foxtel dan Sky News Australia. Australian Consolidation Press sendiri yang didirikan pada tahun 1933 memproduksi lebih dari 60 majalah di Australia seperti Australian Women's Weekly, Cleo, Harper's Bazaar, Australian House and Garden dan sebagainya.

Praktek oligopoli dalam kepemilikan media massa di Australia tersebut tentu memberikan dampak bagi masyarakat Australia. Yang paling terasa adalah, dengan pilihan yang begitu, mereka tidak bisa memilih sumber informasi lainnya apabila ingin mengetahui isu-isu politik. Selanjutnya, pemilik media dan manajer-manajernya memiliki kesempatan untuk mengintervensi berita yang diturunkan oleh media tersebut. Dan kecenderungan yang ada memang seperti itu. Seringkali mereka bertindak secara langsung untuk memastikan bahwa berita, editorial atau bahkan seluruh liputan berita tersebut merefleksikan sudut pandang tertentu atau melindungi kepentingan tertentu. Sedikit sekali pilihan yang tersedia bagi seorang staff di media yang tidak suka dengan perintah-perintah intervensi dari atasan. Karena praktek oligopoli, mereka tidak dapat bebas keluar-masuk perusahaan karena pada dasarnya kepemilikan media massa di Australia hanya berada di tangan beberapa orang saja. Dampak yang terakhir adalah, bahwa pemilik dapat mengurangi biaya produksi tanpa takut akan kompetisi. Salah satu cara untuk mengurangi biaya produksi yang paling mudah ditempuh adalah dengan cara mengurangi biaya untuk pegawai. Artikel yang ditulis di salah satu surat kabar sering dimuat juga di surat kabar lain yang masih berdiri dalam satu perusahaan yang sama. Implikasinya adalah, sudut pandang yang dapat digunakan masyarakat semakin terbatas apalagi dengan kemungkinan adanya monopoli pemberitaan karena konglomerasi media massa tersebut. Perlu diingat bahwa selain radio dan televisi ABC, semua media massa di Australia adalah media komersial yang dikuasai oleh perusahaan swasta.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan dari sumber kepada khalayak (menerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, TV. Media menampilkan sesuatu dengan peranan yang diharapkan, dinamika masyarakat akan terbentuk, dimana media adalah sebuah pesan. Jadi untuk menyebarkan informasi, media massa sangat efektif yang dapat mengubah sikap, pendapat dan prilaku komunikasi. Media massa memberikan informasi tentang perubahan. Fungsi utama media massa adalah untuk memberikan informasi pada kepentingan yang menyebarluaskan serta media massa pada seketika waktu yang tak terbatas.

Secara teritorial Australia adalah sebuah negara yang sangat besar, hal yang kemudian menciptakan suatu kebutuhannya atas sarana *sharing* informasi yakni media massa. Akan tetapi hal ini tentunya berimbang sehingga pertanyaan tentang siapa mengontrol siapa dalam media dapat dipahami bahwa hal ini adalah bentuk saling interaksi dalam upaya pembangunan bukan dalam bentuk hegemoni global yang selalu berujung pada penindasan global[1]. Media massa dewasa ini menjadi sebuah barang hebat dalam dunia globalisasi, persaingan informasi dan teknologi membawa media massa menduduki poin penting dalam hal ini, media massa seakan menjadi bisnis ataupun sebuah hal baru dengan sejuta potensi yang ada di dalamnya sehinggatak mengherankan ketika muncul nama-nama orang yang berada dibelakang wacana media.

Tahun 1803 ada surat kabar Sydney Gazzette merupakan satu-satunya publikasi pemerintah yang diterbitkan di koloni Australia. Setahun kemudian seluruh pengawasan pemerintah terhadap pers dihapuskan, perkemb. Masih terbatas. Tahun 1923(120 tahun kemudian), hanya terdapat 26 surat kabar yang diterbitkan oleh

---

[1]Abdurrachman Surjomihardjo.1980. *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia.* Jakarta: LEKNAS-LIPI.

sekitar 21 perusahaan. Tahun 1990-an meningkat drastis ada 650 surat kabar termasuk majalah dan buletin.[2]

Semakin berkembang zaman, semakin besar peran yang dipegang oleh media massa dalam kehidupan politik. Terjadinya konsentrasi kepemilikan berkaitan dengan monopoli pemberitaan, terjadi bias politik dari pemilik terhadap berita yang disajikan. Lambat laun, media massa Australia menjadi alat kontrol sosial dalam masyarakat luas termasuk politik. Politik menjadi masalah yang sensitif dan menjadi liar ketika politik tidak lagi memandang etika dan kemanusiaan sehingga menghalalkan segala cara termasuk melalui media massa yang menjadi wadah penghubung dengan jutaan orang diseluruh dunia. Anggapan bahwa teknologi akan menjadi kunci penguasa di dunia, maka tak sedikit yang memandangan bahwa dengan menguasai media massa maka mereka juga akan menguasai dunia. Karena teknologi bisa menciptakan pengaruh yang besar tentang pandangan public terhadap sesuatu.

B. Rumusan Masalah

Mengapa terjadi oligopoli media massa di Australia?

C. Kerangka Berpikir

Konsep Oligopoli

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia[3], oligopoli adalah keadaan pasar yang produsen pembekal barang hanya berjumlah sedikit sehingga mereka atau seorang dari mereka dapat mempengaruhi harga pasar. Rusdi Rasyidin mendefinisikan pasar oligopoly sebagai suatu bentuk interaksi permintaan dengan penawaran, dimana terdapat beberapa penjual/produsen yang menguasai seluruh permintaan pasar. Ciri-cirinya sebagai adalah berikut :[4]

---

[2]https://www.cnnindonesia.com/internasional/20191021113413-113-441454/protes-pembatasan-informasi-koran-australia-dihitamkan, diakses 12 Maret 2020, pukul: 05.30 Wib

[3] https://kbbi.web.id/oligopoli, diakses 12 Maret 2020, pukul 05.30 wib

[4] Arsam. 2014. *Olygopoli, Kepemilikan Media dan Kebijakan Negara,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 34

1. Terdapat beberapa penjual/produsen yang menguasai pasar.
2. Barang yang diperjualbelikan dapat homogeny dapat pula berbeda corak (differentiated product).
3. Terdapat hambatan masuk yang cukup kuat bagi perusahaan di luar pasar untuk masuk kedalam pasar.
4. Suatu diantara para Oligopolis merupakan price leader yaitu penjual yang memiliki/pangsa pasar yang terbesar. Ia memiliki kekuatan yang besar untuk menetapkan harga dan para penjual yang lainnya biasanya terpaksa mengikuti harga tersebut.

Oligopoli, menunjuk pada kondisi dimana beberapa penjual menguasai pasar. Oligopoli terjadi karena akibat dari komersial industri media massa dimana para kapitalis media memang telah berusaha memaksimalkan untuk mengurangi resiko usaha. Sebagian besar pasar yang ada cenderung membentuk kekuatan oligopolistik, dimana beberapa industri media justru menciptakan serangkaan hambatan yang menutup peluang bagi pendatang baru. Pada sisi penekanan harga, produksi, dan keuntungan kekuatan oligopolistik yang ada justru mengarah ke pembentukan monopoli yang sangat jauh dari mitos pasar yag penuh saingan.

Media massa yang berupaya untuk mengejar tujuan ekonomi mereka akam cenderung berusaha untuk terus meningkatkan rating mereka dengan menyajikan tayangan yang hanya sebatas mainstream, bahkan tak sedikir yang menyajikan berita atau tayangan yang tidak sesuai dengan etika media. Persaingan bebas media dapat berakibat sebagian pemilik dan praktisi media menual profesionalitas, kode etik, dan tanggungjawab moral jurnalisme. Semua ini dilakukan demi meraih keuntungan untuk bertahan terbit di tengah pasar yang amat ketat. Selain faktor ekonomi, faktor politik juga berpengaruh besar terhadap kepentingan media dalam konsentrasi media massa di beberapa negara, misal media yang dekat dengan pemerintah cenderung menghadirkan pemebritaan yang pro pemerintah atau ketika pemilik media merupakan tokoh politik, ia akan cenderung menggunakan media miliknya sebagai alat politik. Hal tersebut mengesampingkan hak masyarakat akan tayangan atau informasi memuat kebenaran karena berita atau informasi yang disampaikan cenderung bias memihak pihak tertentu.

Selain itu, apabila ada pemain baru yang hendak memasuki pasar, maka akan

sulit untuk memasuki tersebut apabila tidak memiliki kemampuan atau kekuatan yang sama denngan pemain yang telah ada sebelumnya yang telah memiliki teknologi dan pengalaman yang lebih kuat, karena persaingan yang terjadi tidak hanya persaingan isi dan jenis program tapi juga persaingan infra struktur dan tekonologi. Konsentrasi kepemilikan media bukanlan semata-semata fenomena bisnis, melainkan fenomena ekonomi politik yang melibatkan kekuasaan.

Konsep Kebabasan Pers

Kebebasan pers di sini adalah sebagai terjemahan dari *freedom of the press,* yang dianalogikan sebagai kebebasan dari penguasa. Dalam sejarah, pengakuan dan perlindungan atas hak untuk bebas dari pengaruh atau tekanan penguasa sudah dimulai sejak deklarasi *Magna Charta* (1215).[5] Dalam konteks pers, secara eksplisit ditetapkan dalam Pasal 12 *Virginia Bill of Right* (15 Mei 1776) tentang kebebasan pers surat kabar. Selanjutnya, spirit Piagam *Virginia* dimasukkan ke dalam Konstitusi Amerika Serikat (1787). Kemudian, tahun 1789, Piagam *Virginia* diadopsi pula oleh Perancis. Kebebasan pers dengan demikian adalah kebebasan berkomunikasi dan berekspresi dalam memberikan informasi kepada publik melalui media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Kebebasan ini menunjuk tidak adanya campur tangan Negara atau pemerintah maupun elemen masyarakat lain, baik individu maupun kolektif dalam memberikan informasi kepada publik, dan secara konstitusional keberadaanya dilindungi oleh negara.

Teori pers bebas (*libertarian*) merupakan antitesa dari pendekatan sebelumnya dalam praktik pers, yaitu pers otoriter (*outritarian*), yang menjadikan pers sebagai subordinat pemerintah atau negara. Sebagaimana nama yang melekat pada dirinya, pers libertarian merupakan praktik kebebasan pers, yang dalam praktiknya menolak intervensi pemerintah atau penguasa dalam memberikan informasi kepada khalayak pembacanya. Pers, dalam teori libertarian bukan subordinat dari penguasa, melainkan mitra sejajar pemerintah dalam menjalankan roda pembangunan.

Pers bebas diyakini lahir dari rahim libertarian, yang menjadikan kebebasan individu sebagai hak asasi. Siebert menjelaskan bahwa lahirnya pers bebas dipengarui oleh filsafat libertarian yang berkembang di abad XVII dan XVIII. Prinsip-prinsip

[5] Atmakusumah.1981. *Kebebasan Pers dan Informasi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hal 12

demokrasi yang menghargai dan memberikan kebebasan individu dalam memandang realitas sosial merupakan prinsip-prinsip utama dalam filsafat libertarian. Manusia menurut kaum libertarian adalah binatang yang rasional dan memiliki tujuan sendiri. Kebahagian dan kesejahteraan individual adalah tujuan masyarakat, dan manusia sebagai organisme yang berfikir, sanggup mengorganisir dunia sekelilingnya dan membuat keputusan yang dapat memajukan kepentingannya.[6]

Secara sederhana menurut Siebert, teori libertarian menempatkan manusia sebagai mahluk yang berakal yang mampu membedakan sendiri mana yang benar mana yang salah. Mereka tidak perlu dibimbing oleh penguasa. Kebenaran tidak lagi menjadi milik kekuasaan, tetapi menjadi salah satu hak asasi manusia, dan karenanya menjadi milik setiap individu. Sumbangan terpenting liberalisme dalam kehidupan masyarakat, terutama hubungan pers dan penguasa adalah pernyataan pentingnya setiap orang, kepercayaan pada kemampuan berfikirnya, dan konsep hak-hak asasi, di mana kebebasan memilih agama, berbicara, dan kebebasan pers merupakan bagiannya.

Siebert mengutip pendapat Prof. Carl Becker yang dianggap sangat tepat sebagai landasan bagi pemikiran di atas, sebagai berikut:[7]

”*doktrin demokrasi tentang kebebasan berbicara dan kebebasan pers apakah itu dianggap sebagai hak asasi atau hak yang tidak dapat dipindahkan, berdasarkan pada beberapa asumsi. Salah satu di antaranya adalah bahwa manusia ingin mendapatkan kebenaran dan akan cenderung ingin dibimbing kebenaran itu. Asumsi lain adalah, bahwa satu-satunya cara yang pada akhirnya akan memberikan kebenaran adalah kompetensi opini yang bebas di ”pasar terbuka”. Asumsi lainnya lagi mengatakan bahwa karena setiap orang berbeda-beda pendapatnya, maka setiap orang harus diperbolehkan menyampaikan secara bebas dan bahkan giat pendapatnya sendiri, asalkan ia mengijinkan ula orang lain menggunakan hak yang sama. Asumsi terakhir mengatakan bahwa dengan adanya saling toleransi dan saling membandingkan opini-opini yang berbeda itu akan muncul opini yang terbukti paling rasional dan dapat diterima semua pihak.”*

---

[6] Luwarso, Lukas. 1999. *The Liberation of the Indonesia Press*. The Southeast Asia Media: Philipine center for Investigative Journalsm& Dag Hammarskjold Foundation, hal 31

[7] *Ibid*

Abad XVIII, pada awal abad tersebut, pengawasan pers otoritarian sedang sekarat. Kekuasaan kerajaan untuk mengatur pers telah dihapuskan, gereja tidak lagi berfunsi sebagai agen-agen pengatur, dan monopoli negara dalam penerbitan telah dihapuskan. Menjelang akhir abad itu, prinsip-prinsip pers libertarian disisipkan dalam hukum dasar dan kalimat undang-undang yang melindungi kebebasan berbicara dan kebebasan pers. Siebart mencatat setidaknya ada tiga orang Inggris dan satu orang Amerika yang telah memberikan sumbangan-sumbangan penting dalam masa transisi, yaitu: John Milton di abad XVII; John Erskine dan Thomas Jefferson pada abad XVIII; dan John Stuart Mill d abad XIX. Pernyataan Mill yang terkenal mengenai pentingnya kebebasan individu untuk berekspresi seperti yang dikutif Siebert berikut ini:

”*Jika semua umat manusia kecuali satu orang, punya satu pendapat yang sama dan hanya satu orang pendapatnya yang berbeda, maka umat manusia tidak dibenarkan untuk membungkam yang satu orang itu, sama halnya orang yang satu itu, jika punya kekuasaan, tidak dibenarkan membungkam umat manusia. Jika sebuah opini merupakan milik perorangan yang tidak ada nilainya selain untuk dirinya sendiri; jika dihilanginya kesempatan untuk menikmati opini itu semata-mata merupakan sebuah kerugian pribadi, maka akan ada kerugian yang dibebankan pada sedikit orang atau pada banyak orang. Tetapi membungkam pernyataan pendapat merupakan kejahatan karena membungkam itu adalah perampokan terhadap manusia; anak cucu kita dan generasi yang sekarang ini; mereka yang tidak sepakat dengan opini itu, tetap lebih banyak daripada yang meyetujuinya. Jia itu benar, mereka kehilangan kesempatan untuk merubah kesalahan menjadi kebenaran; jika opini itu salah, mereka kehilangan keuntungan yang begitu besar, yaitu pemahaman yang lebih jelas dan kesan yang lebih hidup tentang kebenaran sebagai tabrakan antara kebenaran itu dengan kesalahan.”*

Pers bebas (libertarian) pada dasarnya menunjuk dan mengindikasikan tidak adanya campur tangan penguasa (pemerintah), maupun setiap elemen masyarakat lain, baik perorangan maupun kolektif dalam menyampaikan informamsi kepada publik. Hal ini merupakan implikasi pratis dari prinsip-prinsip dasar demokrasi. Memang secara historis, pers libertarian tumbuh dan berkembang dari rahim demokrasi.

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode dan Cara Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, metode penelitian kualitatif ialah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati [8]

Metode Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.[9] Ditinjau dari segi masalah yang diselidiki, teknik dan alat yang digunakan peneliti, serta tempat dan waktu penelitian yang dilakukan, penelitian ini masuk dalam kategori penelitian perpustakaan dan dokumenter. Dalam metode ini peneliti berusaha untuk mendeskripsikan tentang praktek oligopoli media massa di Australia.

B. Teknik Pengambilan Data

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian dokumen. Penelitian dokumen dimaksudkan unuk mendeskripsikan berbagai realita yang diteliti. Data diperoleh melalui sumber data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan mengadakan evaluasi terhadap sumber, keadaan data sekundernya dan juga peneliti harus menerima limitasi-limitasi dari data tersebut. Data- data sekunder diperoleh melalui studi dokumenter, yakni melalui majalah, surat kabar, buku-buku dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan topik penelitian ini.

Peneliti mengumpulkan data dari perpustakaan Fisip Universitas Gadjah Mada

---

[8] Lexy J Moleong, 2017. *Metode penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda, hal 23

[9] M. Natsir, 2017, *Metode Penelitian,* Bandung Rosdakarya, hal 35

Yogyakarta. Juga dari beberapa perpustakaan yang terdapat data yang relevan dengan penelitian ini, seperti perpustakaan wilayah Jawa Tengah dan Perpustakaan dari Universitas di Semarang.

C. Teknik Analisa Data

Analisa data dilakukan melalui interpretasi dari dokumentasi yang terkumpul, kemudian dianalisis secara deskriptif – kualitatif. Dengan mengadakan survei terhadap data yang telah ada peneliti menggali teori-teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang berkepentingan. Untuk mengetahui validitas data informasi yang diperoleh diadakan *Cross cheking* data tersebut menunjukkan adanya *reliable* data yang akan dianalisa.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dinamika Media Massa Australia

Dalam lingkaran media massa, demokrasi selalu dikaitkan dengan pembentukan opini publik. Keterkaitan antara demokrasi dan peran media ini memang tidak diikat oleh aturan hukum sehingga konsekuensinya tidak dapat ditegakkan. Namun, bukan berarti ini adalah sebuah pilihan. Sumber lain mengenai peran media dalam kaitannya antara demokrasi dan media massa dapat merujuk teori sosial dan teori politik, orientasi media terhadap masyarakat baik nasional maupun internasional, serta klaim-klaim profesionalisme yang menjadi konvensi, serta aspirasi.

Fakta bahwa media terikat oleh hubungan antara pasar dan klien (termasuk pengiklan) ini biasanya ada sikap saling mempengaruhi antar perilaku media. Ada sumber pengaruh yang lain, yaitu variabel kekuasaan (negara/ lembaga negara). Kondisi yang menentukan tingkat independensi media adalah pandangan pemerintah. Pengaruh ini bersumber dari banyak kepentingan seperti kepentingan ekonomi, politik, dan budaya yang dipengaruhi oleh media. Individu atau organisasi yang berpengaruh bisa dipengaruhi oleh media. Oleh karena itu, mereka mengawasi media karena memiliki kepentingan untuk melindungi diri mereka atau untuk memengaruhi media.

Seharusnya media mengedepankan prinsip *diversity of ownership* dan *plurality of content.*[10] Sehingga individu dan komunitas memiliki akses yang sama kepada media. Namun, praktik monopoli, oligopoli, konglomerasi menjadi penghambat bagi terlaksananya norma-norma oleh media. Jelasnya, Salah satu indikasi bahwa praktik oligopoli dan monopoli terhadap media massa dapat dilihat dari kepemilikan media yang hanya dimiliki oleh mereka yang memiliki banyak modal dan dikuasai oleh segelintir orang, serta mereka yang memiliki media lebih dari satu atau dua keatas. Indikasi lainnya adalah bahwa dengan munculnya satu surat kabar yang kuat di suatu kota, kemudian surat kabar tersebut menerbitkan lagi surat kabar-surat kabar lainnya

[10]https://koran.tempo.co/read/internasional/446908/pers-australia-menuntut-ekspos-rahasia-pemerintah?, diakses 13 Maret 2020, pukul 06.00 Wib

dikota yang sama, baik harian maupun mingguan.

Dewan Pers Australia mengadopsi Piagam Pers Bebas untuk memberikan bobot pengertian kebebasan komunikasi. Piagam mengakui pengesahan Australia terhadap Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, hak untuk mendukung arus bebas informasi demi memungkinkan berita dan opini terkait kepentingan publik agar dapat tersedia secara bebas bagi warga Australia. Piagam menyokong pendekatan tersendiri dari Dewan Pers untuk pengembangan kebijakan dengan tujuan menjaga kemerdekaan pers dari peraturan pemerintah. Hal ini juga menjadi dasar dukungan bagi Dewan Pers untuk memasukkan kebebasan berbicara, dan pers, dalam pengembangan *Bill of Rights* untuk Australia.[11]

Dalam konteks media massa di Australia, korelasi antara media massa terhadap politik dan pemerintahan lebih erat lagi karena praktek oligopoli yang berlangsung di sana. Beberapa kritikus berargumen bahwa kekuatan media berkorelasi erat dengan siapa pemilik media tersebut. Media massa di Australia hanya dikuasai oleh seglintir pengusaha kaya saja sehingga dapat dikatakan bahwa dalam konteks kepemilikan media massa berlaku sistem yang sangat oligopoli. Oligopoli berkembang karena faktor ekonomi dan politik. Maka ketika ada suatu perusahaan media massa yang kekurangan finansial ketika berproduksi, maka para pengusaha kaya bisa menjadi donator atau terkait pemberian izin. Maka disinilah politik terjadi.

Dua penguasa media yang paling besar dan terkenal adalah Rupert Murdoch dan Kerry Packer. Tidak hanya raja media di Australia, mereka berdua termasuk penguasa-penguasa media di dunia ini. Dialah penguasa media massa dunia, dan selalu berusaha mengepahkan sayapnya di kancah global, News Corporation miliknya ke berbagai pelosok dunia, adalah pemilik saham di Fox Network, Star TV, Studio 20th Century Fox, surat kabar The Times dan The Sun di London, televisi kabel Fox News, Fox Sport dan lainnya. Dan di Australia sendiri, Murdoch memiliki 16 televisi lokal.

Sementara Kerry Packer memiliki Australian Consolidated Press (ACP) dan Publishing and Broadcasting Limited (PBL). Dalam bidang media, PBL memiliki sembilan jaringan televisi di Australia dan Australian Consolidation Press. PBL memiliki jumlah investasi yang besar dalam berbagai televisi berbayar dan jaringan

[11]https://dewanpers.or.id/berita/detail/1062/Dewan-Pers-dan-Hubungan-Luar-Negeri, diakses 13 Maret 2020, pukul 7.00 Wib

televisi digital, seperti Foxtel dan Sky News Australia. Australian Consolidation Press sendiri yang didirikan pada tahun 1933 memproduksi lebih dari 60 majalah di Australia seperti Australian Women's Weekly, Cleo, Harper's Bazaar, Australian House and Garden dan sebagainya.

Dengan demikian maka masyarakat Australia tidak lagi bisa memilik mana media yang independen dan terbebas dari lingkaran politik oligarki media massa. Karena jelas bahwa semua elemen yang memproduksi berita adalah mereka yang telah saling berintevensi untuk menerbitkan sebuah berita. Maka masyarakat harus benar-benar cerdas mencari sudut pandangan berita tersebut karena oligopoly media massa yang terjadi oleh para konglomerasi media massa.

Media massa bukan hanya sebagai sumber informasi politik, namun juga menjadi faktor pendorong atau trigger yang dapat berimplikasi pada perubahan politik. Selain itu, masih banyak aspek dari media massa yang mengukuhkan dirinya menjadi pilar penting di politik dan pemerintahan Australia. Menurut Harsono Suwardi, seorang profesor komunikasi Universitas Indonesia, terdapat empat faktor yang membuat media massa memiliki pengaruh yang begitu kuat dalam kehidupan politik, yakni **:**[12]

*Pertama, m*edia massa memiliki daya jangkau yang luas dalam menyebarkan informasi politik, bahkan mampu melewati batas wilayah, kelompok umur, jenis kelamin dan status sosial-ekonomi. Dengan begitu, status politik yang dimediasikan menjadi perhatian bersama di berbagai tempat dan kalangan.

Kedua, media massa memiliki kemampuan untuk melipatgandakan pesan yang begitu mengagumkan. Dilipatgandakan atau tidaknya pesan memiliki korelasi yang begitu erat dengan respons masyarakat terhadap isu tersebut. Apabila responnya positif, kecenderungannya media massa akan melipatgandakan isu tersebut. Dampak pelipatgandaan ini tentu sangat besar di te]ngah masyarakat

Ketiga, setiap media dapat mewacanakan sebuah peristiwa politik sesuai dengan pandangannya masing-masing. Media massa memiliki kebijakan redaksional terkait dengan isi peristiwa politik yang ingin disampaikan. Kebijakan ini membuat media banyak diincar oleh pihak-pihak yang ingin memanfaatkannya dan sebaliknya,

---

[12] Hidayat, Dedy. N. Gazali, Effendi, Suwandi, Harsono dan S.K Ishadi. 2000. *Pers dalam Revolusi Mei. Runtuhnya Sebuah Hegemoni*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hal. 34

juga dijauhi oleh pihak-pihak yang tidak sepaham dengannya.

Keempat, media massa memiliki fungsi agenda setting. Dengan begitu media massa memiliki hak untuk menyiarkan suatu peristiwa politik atau tidak menyiarkannya. Jadi media massa menggiring opini publik dalam suatu kuorum atau diskusi. Output dari diskusi inilah yang akan menentukan agenda-agenda dalam politik pemerintahan.

Kelima, pemberitaan peristiwa oleh suatu media kecenderungannya akan berkaitan dengan media lainnya sehingga terbentuklah suatu rantai informasi (*media as links in other chains*) yang menambah kekuatan media massa dalam menyebarkan informasi politik dan otomatis juga memperbesar dampak yang dapat mereka berikan terhadap publik.

Dari kelima faktor tersebut, dapat dikerucutkan bahwa fungsi media dalam politik yang paling esensial adalah dengan kemampuannya menggiring opini publik dapat mempengaruhi perspektif masyarakat dalam memandang politik itu sendiri, apakah pro ataukah kontra. Hubungan antara media massa dengan politisi sendiri bagaikan hubungan "ayam" dengan telur". Mereka saling membutuhkan dan tidak dapat dipisahkan. Tanpa berita, media massa tidak akan bisa berjalan dan politisilah yang menyediakan berita ini. Sedangkan politisi membutuhkan media massa agar pandangan-pandangan politiknya disebarkan ke masyarakat luas, terutama bagi daerah pemilihnya. Maka dari itu, bukanlah hal yang mengherankan apabila politisi di Australia sangat menghargai media massa karena pengaruhnya yang begitu besar terhadap masyarakat hingga secara tidak langsung mempengaruhi pemerintahan dan politik Australia.

Karena penduduk Australia tergolong cukup banyak, dan sebagian dari masyarakat tertarik pada isu politik. Ketika akan datang masa pemilu, maka peran media massa sangatlah penting guna menarik perhatian masyarakat. Peran media sangat krusial, melihat bahwa kampanye-kampanye di media massa akan menjadi sebuah ajang kompetisi bagi para calon pemimpin. Media massa dijadikan ajang untuk menampilkan citra yang baik dan sekaligus menjadi perpolitikan yang begitu amat penting bagi para calon pemimpin.[13]

---

[13] Stuart.Hall. 1979. Representation: Culture Representation and Signifying Practices. London:

B. Faktor Pendorong Oligopoli Media Massa

"If you're not carefull, the newspaper will have you hating the people who are being oppressed and loving the people who are doing the oppressing (Malcolm X)"

Sepenggal kutipan di atas secara tersirat menunjukkan bahwa media massa, pada dasarnya memiliki kekuatan yang begitu besar. Sedemikian besar *power* yang dimiliki hingga media massa dapat mempengaruhi suatu aktor untuk berprilaku atau berpikir sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh media massa, sekalipun pada mulanya prilaku atau pikiran tersebut tidak sesuai dengan kehendak si Aktor. Dengan kata lain, media massa memiliki kemampuan untuk mempengaruhi *mindset* seseorang. Ya, media massa dapat mempengaruhi perspektif kita dalam memandang dunia. Karena hal tersebut, banyak orang yang kemudian memanfaatkan media massa sebagai sarana untuk mencapai kepentingan yang ingin diraih. Seorang produsen makanan cenderung mengiklankan produknya di televisi, koran ataupun radio untuk mempengaruhi masyarakat agar mengkonsumsi produknya. Seorang penyanyi gencar mempromosikan album barunya di media massa untuk mempengaruhi masyarakat agar menyanyikan lagu-lagunya. Begitu juga untuk para politikus. Media massa, dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Efektivitas media massa untuk suatu perubahan politik memerlukan situasi politik yang kondusif. Iklim demokrasi, sangat mempengaruhi mati atau hidupnya media massa di suatu negara. Media massa yang bebas adalah salah satu indikator adanya demokrasi di suatu negara. Bahkan dalam negara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, media massa bahkan dapat menjadi salah satu pilar penting di sana.

Australia, adalah negara yang dibangun di atas tradisi demokrasi liberal. Karenanya negara pesemakmuran Inggris ini mengakui adanya supremasi hukum, menghormati toleransi beragama, dan tentunya kebebasan berbicara serta berserikat. Ditopang dengan sistem pemerintahan yang demokrasi seperti itu, media massa kemudian menjadi salah satu pilar yang sangat esensial dalam sistem politik Australia.

Semakin berkembang zaman, semakin besar peran yang dipegang oleh media massa dalam kehidupan politik. Telah terjadi perluasan makna dalam konteks peranan yang dimainkan oleh media massa ini. Media massa bukan hanya sebagai sumber

---

Sage Publication Jewkes,

informasi politik, namun juga menjadi faktor pendorong atau trigger yang dapat berimplikasi pada perubahan politik. Selain itu, masih banyak aspek dari media massa yang mengukuhkan dirinya menjadi pilar penting di politik dan pemerintahan Australia. Media massa tidak bisa dipisahkan dengan politikus. Tanpa berita, media massa tidak akan bisa berjalan dan politisilah yang menyediakan berita ini. Sedangkan politisi membutuhkan media massa agar pandangan-pandangan politiknya disebarkan ke masyarakat luas, terutama bagi daerah pemilihnya. Maka dari itu, bukanlah hal yang mengherankan apabila politisi di Australia sangat menghargai media massa karena pengaruhnya yang begitu besar terhadap masyarakat hingga secara tidak langsung mempengaruhi pemerintahan dan politik Australia. Sedemikian besar peran media, hingga Napoleon pernah berkata bahwa: [14]

"*I fear three newspapers more than a hundred thousand bayonets*.**"**

Dalam konteks media massa di Australia, korelasi antara media massa terhadap politik dan pemerintahan lebih erat lagi karena praktek oligopoli yang berlangsung di sana. Beberapa kritikus berargumen bahwa kekuatan media berkorelasi erat dengan siapa pemilik media tersebut. Media massa di Australia hanya dikuasai oleh seglintir pengusaha kaya saja sehingga dapat dikatakan bahwa dalam konteks kepemilikan media massa berlaku sistem yang sangat oligopoli.

Oligopoli media di Australia berkembang selain karena faktor ekonomi, juga karena faktor politik. Telah diketahui bahwa untuk membentuk suatu media massa membutuhkan dana yang tidak sedikit. Setelah suatu media terbentuk, masih dibutuhkan dana yang tidak kalah besar untuk biaya-biaya produksi ketika menjalankannya. Banyak sekali surat kabar di Australia yang bangkrut karena masalah finansial, seperti *Daily Sun and Sunday Sun, Perth's Western Mail, Brisbane's Telegraph, Business Daily dan Sydney Mid-week News*. Oligopoli ini semakin berkembang karena faktor-faktor politik yang ada seperti pemberian izin membuat televisi ke beberapa perusahaan tertentu saja. Lagipula, sebagai pemain lama raja-raja media di Australia sudah mendapatkan kemapanan yang sangat sulit diganggu, baik dalam konteks ekonomi maupun dalam konteks politik.

---

[14] Zulkifli Hamid, *Sistem Politik Australia* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset & LIP-FISIP-UI, 1999), h. 348.

Dua penguasa media yang paling besar dan terkenal adalah Rupert Murdoch dan Kerry Packer. Tidak hanya raja media di Australia, mereka berdua termasuk penguasa-penguasa media di dunia ini. Murdoch, yang selama puluhan tahun mengembangkan sayap News Corporation miliknya ke berbagai pelosok dunia, adalah pemilik saham di Fox Network, Star TV, Studio 20th Century Fox, surat kabar The Times dan The Sun di London, televisi kabel Fox News, Fox Sport dan lainnya. Di Australia sendiri, Murdoch memiliki 16 televisi lokal. Sementara Kerry Packer memiliki Australian Consolidated Press (ACP) dan Publishing and Broadcasting Limited (PBL). Dalam bidang media, PBL memiliki sembilan jaringan televisi di Australia dan Australian Consolidation Press. PBL memiliki jumlah investasi yang besar dalam berbagai televisi berbayar dan jaringan televisi digital, seperti Foxtel dan Sky News Australia. Australian Consolidation Press sendiri yang didirikan pada tahun 1933 memproduksi lebih dari 60 majalah di Australia seperti Australian Women's Weekly, Cleo, Harper's Bazaar, Australian House and Garden dan sebagainya.

Praktek oligopoli dalam kepemilikan media massa di Australia tersebut tentu memberikan dampak bagi masyarakat Australia. Yang paling terasa adalah, dengan pilihan yang begitu, mereka tidak bisa memilih sumber informasi lainnya apabila ingin mengetahui isu-isu politik. Selanjutnya, pemilik media dan manajer-manajernya memiliki kesempatan untuk mengintervensi berita yang diturunkan oleh media tersebut.

Dan kecenderungan yang ada memang seperti itu. Seringkali mereka bertindak secara langsung untuk memastikan bahwa berita, editorial atau bahkan seluruh liputan berita tersebut merefleksikan sudut pandang tertentu atau melindungi kepentingan tertentu. Sedikit sekali pilihan yang tersedia bagi seorang staff di media yang tidak suka dengan perintah-perintah intervensi dari atasan. Karena praktek oligopoli, mereka tidak dapat bebas keluar-masuk perusahaan karena pada dasarnya kepemilikan media massa di Australia hanya berada di tangan beberapa orang saja. Dampak yang terakhir adalah, bahwa pemilik dapat mengurangi biaya produksi tanpa takut akan kompetisi. Salah satu cara untuk mengurangi biaya produksi yang paling mudah ditempuh adalah dengan cara mengurangi biaya untuk pegawai. Artikel yang ditulis di salah satu surat kabar sering dimuat juga di surat kabar lain yang masih berdiri dalam satu perusahaan yang sama.

Implikasinya adalah, sudut pandang yang dapat digunakan masyarakat semakin terbatas apalagi dengan kemungkinan adanya monopoli pemberitaan karena

konglomerasi media massa tersebut. Perlu diingat bahwa selain radio dan televisi ABC, semua media massa di Australia adalah media komersial yang dikuasai oleh perusahaan swasta. Karenanya, tidak ada ikatan-ikatan yang mengharuskan mereka memberitakan sesuatu secara adil. Orientasi politik pemilik, secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi arah pemberitaan.[15]

Peran media massa di Australia semakin terasa ketika masa-masa pemilihan umum. Sudah penulis sampaikan, bahwa mayoritas media massa di Australia berkonsentrasi pada masalah politik. Tingkat konsentrasi mereka ini semakin tinggi hingga hampir di seluruh halaman surat kabar, di televisi juga di radio mengenai berita kampanye, foto-foto para calon pemimpin yang baru, dan iklan dari partai-partai, organisasi, maupun individu. Dalam masa-masa ini dapat dikatakan mereka memainkan peran yang begitu krusial, walaupun bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi suara masyarakat dalam pemilu.

Akibatnya peserta kampanye betul-betul berusaha memanfaatkan media massa semaksimal mungkin. Dalam membangun citra mereka di depan masyarakat, para politisi juga memanfaatkan media sebagai sarana untuk penampilan foto profil mereka atau gambar-gambar mereka. Pesan lisan, yang dilengkapi dengan penayangan gambar dalam televisi atau surat kabar sangat penting bagi mereka. Dengan begitu, simpati publik akan semakin besar, terutama yang ada di daerah pemilihannya. Menyadari urgensi media itulah mereka kemudian membanjiri media dengan iklan-iklan kampanye mereka semasa kampanye.

Karena iklan-iklan dari peserta kampanye tersebut, dapat dikatakan masa kampanye adalah masa-masa panen bagi mereka. Dinamikanya, harga iklan-iklan tersebut pastilah mahal sedangkan di masa kampanye partai-partai politik tidak segan untuk mengeluarkan uang hingga jutaan dolar dalam rangka mengkampanyekan program-program mereka di berbagai media. Terlepas daripada itu, kecenderungannya masyarakat juga akan mengikuti perkembangan kampanye sehingga ratting ataupun jumlah penjualan eksemplar mereka meningkat.

Ada satu contoh kasus menarik yang merefleksikan urgensi media dalam perpolitikan Australia, khususnya pada masa kampanye. Kasus ini terjadi pada dekade

---

[15] Rodney Smith, *Politics in Australia* (Australia: Allen&Unwin Pty Ltd, 1993), h.303-306.

1970-an di Australia, dan masih dikenang hingga sekarang sebagai salah satu tindakan media dalam memberitakan politik yang sudah sangat jauh melewati batasan yang seharusnya. Pada tahun 1975, semua surat kabar milik Murdoch mengecam Perdana Menteri Gough Whitlam, pemimpin Partai Buruh ketika itu. Serangan Murdoch terhadap Whitlam sungguh merupakan hal yang berkontradiksi dengan posisi Murdoch ketika pemilihan tahun 1972. Ketika itu Murdoch menggunakan salah satu surat kabar miliknya yaitu The Australian untuk menyokong Whitlam. Murdoch mendonasikan uanganya lebih dari $74.000 (jumlah yang besar saat itu) untuk kampanye ALP. Hasilnya, slogan 'It's Time' yang didengung-dengungkan oleh Whitlam memenuhi hampir semua surat kabar Murdoch dan Whitlam berhasil memenangkan kampanye.[16]

Ketika Murdoch 'menyerang' Whitlam, laporan berita dan tulisan-tulisan para reporter surat kabar miliknya telah diedit hingga akhirnya yang kemudian muncul dalam surat kabar adalah berita-berita yang mengecam Whitlam. Salah seorang staff Murdoch di The Australian pernah berkata bahwa,

"*You literally could not get a favourable word about Whitlam in the paper. Copy would be cut, lines would be left out.****"*** [17]

Sedemikian besar *back bench subeditor* yang dilakukan Murdoch, hingga para reporter politik suratkabar The Australian pernah mengirimkan surat protes kepada Murdoch. Karena tidak ada response dari Murdoch terkait dengan surat mereka, akhirnya wartawan The Australian melakukan aksi mogok bersama-sama dengan wartawaran dua suratkabar Murdoch lainnya, The Sunday Mirror dan The Sunday Telegraph. Setelah perundingan panjang, Murdoch kemudian berjanji untuk berita-berita selanjutnya, *back bench* yang akan dia lakukan akan tunduk kepada kode etik. Sayangnya janji tersebut diberikan saat masa kampanye hampir selesai. Akhirnya,

---

[16] *Op. Cit,* hal 45

[17] Oxford University Press, *The Murdoch Papers and the 1975 'dismissal' Election*. Diakses darisitus **http://www.oup.com.au/orc/extra_pages/higher_education/hirst__and__patching/murdoch_papers** pada tanggal 11 April 2020, pukul 03.19 Wib

Whitlam kalah dan Malcolm Fraser dari Partai Liberal-lah yang memenangkan pemilu.

Setiap reaksi, tentu ada aksi yang melatarbelakanginya. Orientasi politik Murdoch yang berbeda (pada tahun 1972 mendukung Whitlam dan tahun 1975 justru menjatuhkannya), dilatarbelakangi oleh faktor-faktor tertentu. Salah satunya adalah fakta bahwa pemerintahan Whitlam telah kehilangan dukungan publik. Logikanya, media massa akan memberikan apa yang diinginkan oleh publik agar tingkat penjualan mereka meningkat. Dan itulah yang dilakukan oleh Murdoch. Akan tetapi, tentu ada unsur-unsur politis di dalam permainan tersebut. Hal itu semakin terlihat ketika Malcolm Fraser kemudian menawarkan jabatan duta besar di Jepang kepada mantan staff Murdoch, John Menedue.

Sosok Murdoch karena strategi-strateginya yang luar biasa cerdas hingga berhasil menghimpun kekuatan besar yang mampu mengontrol suatu negara (dalam perkembangannya, Murdoch bahkan mulai mengintervensi politik di Amerika Serikat dan Inggris). Menurut saya, dalam prakteknya bahkan Murdoch lebih licik daripada politikus-politus sendiri. Karena dengan politik yang dia lakukan, Murdoch hampir selalu dapat mencapai kepentingannya. Seorang presiden normalnya hanya dapat berkuasa selama empat tahun akan tetapi seorang Rupert Murdoch ini telah berkuasa selama puluhan tahun. Namun, rasa ngeri dan khawatir itu memang ada. Apa yang akan terjadi terhadap dunia ini apabila media massa sedemikian besar pengaruhnya? Yang lebih parah lagi, media massa itu hanya dikuasai oleh seglintir orang saja? *"I try to keep in touch with the details…I also look at the product daily. That doesn't mean you interfere, but it's important occasionally to show the ability to be involved. It shows you understand what's happening."* (Rupert Murdoch)

BAB IV

KESIMPULAN

Dalam konteks media massa di Australia, korelasi antara media massa terhadap politik dan pemerintahan lebih erat lagi karena praktek oligopoli yang berlangsung di sana. Beberapa kritikus berargumen bahwa kekuatan media berkorelasi erat dengan siapa pemilik media tersebut. Media massa di Australia hanya dikuasai oleh seglintir pengusaha kaya saja sehingga dapat dikatakan bahwa dalam konteks kepemilikan media massa berlaku sistem yang sangat oligopoli.

Oligopoli media di Australia berkembang selain karena faktor ekonomi, juga karena faktor politik. Telah diketahui bahwa untuk membentuk suatu media massa membutuhkan dana yang tidak sedikit. Setelah suatu media terbentuk, masih dibutuhkan dana yang tidak kalah besar untuk biaya-biaya produksi ketika menjalankannya. Oligopoli ini semakin berkembang karena faktor-faktor politik yang ada seperti pemberian izin membuat televisi ke beberapa perusahaan tertentu saja. Lagipula, sebagai pemain lama raja-raja media di Australia sudah mendapatkan kemapanan yang sangat sulit diganggu, baik dalam konteks ekonomi maupun dalam konteks politik.

DAFTAR PUSTAKA

Atmakusumah.1981. *Kebebasan Pers dan Informasi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Arsam. 2014. *Olygopoli, Kepemilikan Media dan Kebijakan Negara,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Hidayat, Dedy. N. Gazali, Effendi, Suwandi, Harsono dan S.K Ishadi. 2000. *Pers dalam Revolusi Mei. Runtuhnya Sebuah Hegemoni*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Hall, Stuart. 1979. *Representation: Culture Representation and Signifying Practices.* London: Sage Publication Jewkes, Jvonne, 2005. Media & Crime. Sage Publication, London, New Delhi

Surjomihardjo, Abdurrachman. 1980. *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia.* Jakarta: LEKNAS-LIPI.

Luwarso, Lukas. 1999. *The Liberation of the Indonesia Press*. The Southeast Asia Media: Philipine center for Investigative Journalsm& Dag Hammarskjold Foundatio

Moleong,Lexy J , 2017. *Metode penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda

Natsir, Moch, 2017, *Metode Penelitian,* Jakarta: Gramedia

Smith, Rodney , *Politics in Australia* (Australia: Allen&Unwin Pty Ltd, 1993)

Hamid, Zulkifli , *Sistem Politik Australia* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset & LIP-FISIP-UI, 1999)

https://www.cnnindonesia.com/internasional/20191021113413-113-441454/protes-pembatasan-informasi-koran-australia-dihitamkan, diakses 12 Maret 2020, pukul: 05.30 Wib

https://kbbi.web.id/oligopoli, diakses 12 Maret 2020, pukul 05.30 wib

https://koran.tempo.co/read/internasional/446908/pers-australia-menuntut-ekspos-rahasia-pemerintah?, diakses 13 Maret 2020, pukul 06.00 Wib

https://dewanpers.or.id/berita/detail/1062/Dewan-Pers-dan-Hubungan-Luar-Negeri, diakses 13 Maret 2020, pukul 7.00 Wib

Oxford University Press, *The Murdoch Papers and the 1975 'dismissal' Election*. Diakses darisitus **http://www.oup.com.au/orc/extra_pages/higher_education/hirst__and__patching/murdoch_papers** pada tanggal 11 April 2020, pukul 03.19 Wib